

# Analisis Kelayakan Finansial Metode CBA, ATF, WTP dalam Peningkatan Kepesertaan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Empiris pada Nelayan Desa Karangsong)

**Rima Kania<sup>1\*</sup>, Asep Dadan Suhendar<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup> Program studi Manajemen Keuangan Perbankan, Politeknik LP3i Kampus Tasikmalaya, Indonesia

Email: [zhafiramutiara55@gmail.com](mailto:zhafiramutiara55@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [asdan@plb.ac.id](mailto:asdan@plb.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi: [zhafiramutiara55@gmail.com](mailto:zhafiramutiara55@gmail.com)

**Abstract.** *Fishermen are a group of informal sector workers who face high levels of social and economic risk. Risky activities at sea, uncertain income, and minimal access to social protection. This study aims to explore the implementation of the social protection program aimed at fishermen residing in Karangsong Village, Indramayu Regency, and to identify factors influencing fishermen's low participation in the BPJS Ketenagakerjaan program. This study uses a qualitative approach with a descriptive nature. Information was obtained through three techniques: direct conversations with informants, observing conditions in the field, and reviewing various documents related to fishermen, village officials, and PERISAI agents. Based on the research findings obtained, it can be concluded that the majority of fishermen in Karangsong Village are not registered as BPJS Ketenagakerjaan participants. This is caused by low social literacy, unstable income, and lack of socialization from related parties. However, there has been an increase in fishermen's awareness of the importance of social protection through field education activities and service digitalization. Optimizing the role of BPJS Employment together with PERISAI agents is expected to expand the scope of protection for all fishermen in the region.*

**Keywords:** *Fishermen; Literacy; PERISAI Agent; Social Protection; BPJS Ketenagakerjaan.*

**Abstrak.** Nelayan merupakan kelompok pekerja sektor informal yang memiliki tingkat risiko sosial dan ekonomi yang tinggi. Aktivitas di laut yang berisiko, pendapatan yang tidak menentu, serta minimnya akses terhadap perlindungan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelusuri bagaimana penerapan program Perlindungan sosial yang ditujukan bagi para nelayan yang berdomisili di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Informasi diperoleh melalui tiga teknik, yaitu berbincang langsung dengan narasumber, melihat kondisi di lapangan, serta menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan nelayan, perangkat desa, dan agen PERISAI. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas nelayan yang berada di Desa Karangsong belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi sosial, penghasilan yang tidak stabil, dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Namun demikian, terdapat peningkatan kesadaran nelayan terhadap pentingnya perlindungan sosial melalui kegiatan edukasi lapangan dan digitalisasi layanan. Optimalisasi peran BPJS Ketenagakerjaan bersama agen PERISAI diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan bagi seluruh nelayan di wilayah tersebut.

**Kata kunci:** BPJS Ketenagakerjaan; Literasi Sosial; Nelayan; Perlindungan Sosial; Desa Karangsong.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya kelautan yang melimpah. Sektor perikanan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, di mana jutaan masyarakat pesisir menggantungkan hidup sebagai nelayan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022), sektor kelautan dan perikanan menyerap lebih dari tujuh juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Pekerja sektor informal merupakan bagian penting dari perekonomian nasional, namun sering kali berada dalam kondisi kerja yang tidak terlindungi secara sosial dan ekonomi. Salah satu kelompok yang paling rentan dalam sektor informal adalah nelayan, yang menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, cuaca ekstrem, fluktuasi hasil tangkapan,

serta ketidakpastian pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial bagi nelayan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman dalam bekerja.

Menurut BPJS Ketenagakerjaan (2023), Para nelayan digolongkan sebagai pelaku usaha di sektor informal yang kesehariannya menghadapi potensi bahaya kerja cukup besar, tetapi kesadaran mereka terhadap perlindungan sosial masih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan(Nugraha et al., 2023) yang menyebutkan bahwa sebagian besar pekerja informal belum memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat perlindungan sosial bagi masyarakat. Padahal, Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, seluruh pekerja baik yang berada di sektor formal maupun informal memiliki hak untuk memperoleh perlindungan kesejahteraan melalui layanan BPJS. Pemerintah Indonesia lewat BPJS Ketenagakerjaan telah menghadirkan sejumlah program jaminan sosial yang mencakup beberapa bentuk perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP). Program tersebut tidak secara penuh difokuskan hanya untuk pekerja di sektor formal, tetapi juga terbuka khususnya bagi tenaga kerja di sektor informal yang digolongkan sebagai pekerja tanpa penghasilan tetap, termasuk nelayan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan nelayan dalam program jaminan sosial masih rendah. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang manfaat program, keterbatasan ekonomi, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait.

Desa Karangsong yang berada di Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah dengan peluang pengembangan sektor perikanan yang cukup menonjol. Mayoritas warga di desa tersebut menggantungkan hidup sebagai nelayan yang masih mengandalkan peralatan tangkap sederhana. Namun, aktivitas melaut memiliki risiko tinggi karena harus berhadapan dengan cuaca ekstrem, ombak besar, serta risiko kecelakaan kerja di laut (Putri et al., 2022). Aktivitas ekonomi masyarakatnya sangat bergantung pada hasil laut, sehingga tingkat risiko pekerjaan tergolong tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan banyak nelayan di Karangsong yang mengalami kecelakaan kerja, bahkan meninggal dunia, tanpa memperoleh santunan karena tidak terdaftar sebagai peserta aktif. Akibatnya, keluarga mereka mengalami kesulitan ekonomi setelah kehilangan kepala keluarga.

Tabel berikut menunjukkan jumlah nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dan kematian serta status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama periode Januari hingga Juli 2025.

**Tabel 1.** Jumlah nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dan kematian selama periode Januari hingga Juli 2025.

Bulan	Kecelakaan Kerja	Kematian	Peserta BPJS	Non-Peserta BPJS
Januari	5	1	1	5
Februari	6	1	1	6
Maret	7	1	2	6
April	8	1	2	7
Mei	10	2	3	9
Juni	12	1	3	10
Juli	14	2	4	12

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan yang mengalami kecelakaan maupun kematian belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi dan kepesertaan BPJS untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi nelayan.

Dalam beberapa Bulan terakhir, sering terjadi kecelakaan kerja dan kematian nelayan di Karangsong akibat cuaca buruk dan minimnya alat keselamatan. Berdasarkan data lapangan dari perangkat desa, sebagian besar korban belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak memperoleh santunan atau perlindungan sosial

#### **Total Kasus Januari–Juli**

- 1) **Kecelakaan kerja:** 62 kasus
- 2) **Kematian:** 9 kasus
- 3) **Peserta BPJS:** hanya **16 orang** yang terlindungi
- 4) **Non-peserta BPJS:** **55 orang** belum terlindungi

Artinya **lebih dari 75% nelayan yang mengalami risiko kerja tidak mendapat santunan BPJS.**

Temuan serupa juga diungkap oleh (Prasetya, 2024) yang menyatakan bahwa sebagian besar nelayan di wilayah pesisir memiliki tingkat literasi sosial dan finansial yang rendah, sehingga kesadaran mereka terhadap jaminan sosial masih minim. Bahkan, menurut (Anggraini & Fadillah, 2024), kurangnya sosialisasi dan pendekatan personal menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pekerja informal dalam program perlindungan sosial (Bangun, Syahputri, Mulkhan, Yanti, Prislina, Maisyarah, & Athar, 2025). Dalam konteks hukum, UU No. 24 Tahun 2011 menekankan bahwa seluruh tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan layanan perlindungan jaminan sosial, tanpa membedakan status formal atau informal. Hal ini diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menegaskan

bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan serta meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Penelitian (Pangestu et al., 2022) menunjukkan bahwa kesadaran nelayan terhadap BPJS Ketenagakerjaan sangat bergantung pada intensitas sosialisasi dari pemerintah daerah dan BPJS. Sementara itu, (Fadilah et al., 2022) menemukan bahwa masih banyak nelayan yang mengandalkan sistem gotong royong antarwarga ketika terjadi kecelakaan atau kematian, bukan melalui perlindungan formal dari lembaga sosial. Di sisi lain, (Wati, 2023) menyebutkan bahwa rendahnya keikutsertaan nelayan dalam jaminan sosial juga dipengaruhi oleh ketidakpastian penghasilan dan kurangnya pendampingan administratif. Nelayan sering kali tidak mengetahui cara mendaftar atau tempat layanan BPJS terdekat. Menurut penelitian (Wahidhani & Solihin, 2024), hanya sebagian kecil nelayan di pantai utara Jawa Barat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya jaminan sosial, dan mereka umumnya adalah nelayan yang tergabung dalam kelompok atau koperasi aktif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran komunitas dalam meningkatkan kesadaran sosial. Hasil penelitian (Ezah, 2019) juga menjelaskan bahwa kepesertaan masyarakat terhadap program jaminan sosial akan meningkat apabila disertai kemudahan administrasi dan penyesuaian mekanisme pembayaran iuran sesuai kemampuan ekonomi peserta. Selain itu, Jurnal KEK Kemenkeu (2022) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya kepesertaan pekerja informal adalah kurangnya kolaborasi antara instansi pusat dan daerah dalam memperluas cakupan peserta jaminan sosial. Penelitian (Wahyuni et al., 2024) menunjukkan bahwa perlindungan bagi nelayan bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga aspek keselamatan kerja dan keberlanjutan ekonomi keluarga. Program jaminan sosial yang optimal akan membantu mencegah kemiskinan akibat kehilangan mata pencaharian.

Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Serta bahwa perlindungan jaminan sosial bagi nelayan masih belum berjalan optimal. Meskipun demikian, masih banyak nelayan di desa ini yang belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Agen PERISAI (Perisai Sosial Indonesia) menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan kepesertaan, terutama melalui pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran iuran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai kesadaran nelayan terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial di Desa Karangsong. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi aktual di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi nelayan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepesertaan dalam program BPJS

Ketenagakerjaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program jaminan sosial bagi pekerja informal, khususnya sektor perikanan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam, terutama terkait tingkat pengetahuan, persepsi risiko, dan hambatan nelayan dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran nyata mengenai situasi yang terjadi di lapangan secara runtut, akurat, dan berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses penelitian.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas perikanan di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Pengumpulan data berlangsung selama Agustus hingga Desember 2025, bersamaan dengan periode sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada kelompok nelayan.

### **Informan Penelitian**

Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan yang diteliti. Informan yang terlibat terdiri dari:

- 1) **Nelayan** sebagai subjek utama penelitian
- 2) **Perangkat Desa** selaku mediator kegiatan sosialisasi
- 3) **Agen PERISAI** sebagai perpanjangan tangan BPJS
- 4) **Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Indramayu** sebagai penyedia program perlindungan sosial

### **Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa teknik digunakan untuk memperoleh data, yaitu:

#### ***Wawancara Semi Terstruktur***

Wawancara dilakukan secara langsung kepada 10 nelayan menggunakan daftar pertanyaan terbuka. Teknik ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, pandangan, serta tantangan yang mereka hadapi terkait program BPJS Ketenagakerjaan.

### ***Observasi Lapangan***

Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas melaut, lingkungan kerja di dermaga, dan interaksi sosial nelayan di TPI. Observasi digunakan untuk memperkuat temuan wawancara dan melihat kondisi sosial-ekonomi secara nyata.

### ***Dokumentasi***

Dokumen yang dikumpulkan mencakup data kecelakaan kerja nelayan, arsip sosialisasi BPJS, dokumen desa, foto-foto lapangan, serta catatan administrasi agen PERISAI.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan model **Miles & Huberman**, yang meliputi tiga tahapan utama:

***Reduksi Data*** → menyaring dan memilih informasi penting dari wawancara, observasi, dan dokumen

***Penyajian Data*** → menyusun kembali informasi dalam bentuk tabel, grafik CBA, tabel kecelakaan, dan analisis ATP–WTP

***Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan*** → merumuskan inti temuan yang berkaitan dengan rendahnya kepesertaan, faktor penyebab, serta perubahan setelah sosialisasi

Analisis diperkuat dengan pendekatan ekonomi melalui:

***Cost–Benefit Analysis (CBA)*** untuk menilai kelayakan iuran BPJS

***Ability to Pay (ATP)*** sebagai indikator kemampuan finansial nelayan

***Willingness to Pay (WTP)*** sebagai ukuran kesediaan nelayan membayar berdasarkan pemahaman manfaat

### **Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data diuji menggunakan **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara nelayan, observasi di lapangan, serta informasi dari perangkat desa dan agen PERISAI. Melalui triangulasi, data yang diperoleh menjadi lebih kredibel, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Karangsong berada di wilayah Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Daerah ini berada di pesisir pantai utara dan dikenal sebagai salah satu sentra nelayan terbesar di Indramayu. Mayoritas warga setempat bekerja sebagai nelayan yang menjalankan aktivitas penangkapan ikan di perairan laut maupun di sekitar pantai. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada hasil laut. Ketika musim ikan tiba, penghasilan nelayan meningkat dan roda ekonomi desa berjalan dengan baik. Namun saat musim paceklik atau cuaca buruk, banyak nelayan yang tidak bisa melaut sehingga penghasilan mereka menurun

drastis. Kondisi ini membuat perekonomian nelayan tidak stabil dan berdampak pada kesejahteraan keluarga.

Pekerjaan sebagai nelayan juga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Risiko tersebut antara lain terjatuh dari kapal, tertimpa alat tangkap, terseret ombak besar, hingga tenggelam. Selain itu, nelayan juga sering mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan akibat bekerja dalam waktu lama di tengah laut. Oleh karena itu, profesi nelayan membutuhkan perlindungan sosial yang dapat memberikan jaminan ketika mereka mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nelayan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena kurangnya sosialisasi, literasi rendah, dan kondisi ekonomi tidak stabil. Wawancara mendalam mengungkapkan bahwa banyak nelayan menganggap risiko kerja sebagai hal biasa dan tidak mengetahui manfaat BPJS secara konkret.

**Tabel 2.** Hasil Wawancara Nelayan.

No	Nama	Ringkasan Hasil Wawancara	Peserta BPJS	Alasan Tidak/Belum Mengikuti
1	N1	Tidak mengetahui manfaat BPJS, jarang ada sosialisasi.	Tidak	Kurang informasi
2	N2	Menganggap risiko kerja adalah hal biasa.	Tidak	Merasa tidak membutuhkan
3	N3	Pendapatan tidak stabil, sulit membayar iuran.	Tidak	Keterbatasan ekonomi
4	N4	Pernah mendengar BPJS dari agen PERISAI.	Ya	-
5	N5	Tidak tahu cara mendaftar dan prosedurnya.	Tidak	Kesulitan administrasi
6	N6	Setuju pentingnya perlindungan sosial.	Ya	-
7	N7	Belum ada sosialisasi langsung dari desa.	Tidak	Kurangnya edukasi
8	N8	Pendapatan tidak menentu, tidak mampu bayar rutin.	Tidak	Ekonomi tidak stabil
9	N9	Sempat ingin mendaftar namun tidak ada pendampingan.	Tidak	Tidak ada pendampingan
10	N10	Menganggap biaya iuran terlalu tinggi.	Tidak	Persepsi biaya tinggi

*Tabel berikut merupakan ringkasan hasil wawancara terhadap 10 nelayan di Desa Karangsong terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tingkat pemahaman, dan alasan mengikuti atau tidak mengikuti program.*

### **Kesadaran Nelayan Terhadap Jminan Sosial**

Temuan selama observasi lapangan memperlihatkan bahwa mayoritas nelayan di Desa Karangsong belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari wawancara yang dilakukan, hanya sebagian kecil nelayan yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sementara mayoritas belum terdaftar. Sebagian besar nelayan belum mengetahui secara jelas manfaat yang bisa diperoleh dari program jaminan sosial.

Mereka menganggap bahwa program tersebut hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri atau karyawan perusahaan. Selain itu, banyak nelayan yang merasa belum mampu membayar iuran secara rutin karena penghasilan mereka tidak tetap. Ada pula pandangan bahwa risiko kerja di laut adalah hal yang sudah menjadi bagian dari pekerjaan, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan pentingnya perlindungan jaminan sosial. Penelitian (Amalia et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pemahaman yang terbatas mengenai manfaat jaminan sosial merupakan penyebab umum rendahnya partisipasi pekerja sektor informal. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait juga membuat banyak nelayan belum memahami hak mereka terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

***Analisis Kelayakan Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis / CBA)***

Metode **paling tepat** untuk menunjukkan bahwa iuran BPJS itu “worth it”.

Metode CBA membandingkan:

***Biaya per bulan:***

Iuran BPJS = ± Rp 16.800 s.d. Rp 36.800

Manfaat potensial yang diterima nelayan:

- 1) **JKK:** biaya pengobatan tak terbatas (*unlimited coverage*)
- 2) **Santunan Kematian Akibat Kerja:** bisa mencapai **Rp 70 juta**
- 3) **JKM:** santunan kematian **Rp 42 juta**
- 4) **Beasiswa anak:** hingga **Rp 174 juta** (untuk 2 anak, jika memenuhi syarat)

**Tabel 3.** Nilai Biaya.

<b>Komponen</b>	<b>Nilai</b>
Iuran BPJS per bulan	Rp 16.800
Iuran per tahun	Rp 201.600
Potensi Santunan JKK	Unlimited biaya pengobatan
Santunan Kematian Akibat Kerja	± Rp 70.000.000
Rasio Manfaat : Biaya	<b>1 : &gt;300 kali lipat</b>

***Ability to Pay (ATP) & Willingness to Pay (WTP)***

1) **ATP** → kemampuan nelayan membayar iuran berdasarkan pendapatan

2) **WTP** → kesediaan nelayan membayar berdasarkan persepsi manfaat

ATP dihitung dari persentase penghasilan yang wajar dialokasikan untuk jaminan sosial.

Biasanya 1-3% dari pendapatan. Jika pendapatan rata-rata nelayan per bulan = **Rp 600.000**

Maka ATP 3% = **Rp 18.000**

→ Artinya nelayan seharusnya mampu membayar iuran BPJS.

Hasil wawancara dimasukan ke aspek WTP:

Nelayan yang sudah paham manfaat = WTP tinggi

Nelayan yang belum paham = WTP rendah

### ***Iuran Sangat Layak (High Benefit vs Low Cost)***

Dari CBA + ATP + pendapatan nelayan, bisa disimpulkan:

- 1) **Biaya iuran sangat kecil** dibanding manfaat finansial.
- 2) **Risiko kerja tinggi**, sehingga BPJS berfungsi sebagai perlindungan keuangan (*financial shock absorber*).
- 3) **Santunan kecelakaan/kematian jauh lebih besar** dari kemampuan nelayan menabung sendiri.

Program BPJS **secara ekonomi layak** diterapkan untuk nelayan.

Hal ini sejalan dengan (Satriawan et al., 2021) yang menjelaskan bahwa ketidakstabilan pendapatan membuat sebagian besar pekerja informal enggan membayar iuran secara reguler. Sehingga memberikan edukasi ke masyarakat terutama nelayan ;“Dengan iuran hanya Rp 16.800 per bulan, nelayan bisa mendapatkan perlindungan hingga puluhan juta rupiah. Jika terjadi kecelakaan saat melaut, semua biaya rumah sakit ditanggung BPJS tanpa batas. Jika meninggal dunia, keluarga mendapat santunan sampai 70 juta. Artinya, apa yang dibayar jauh lebih kecil dibanding yang akan diterima.”;“Iuran satu bulan itu bahkan lebih kecil dari harga rokok sehari. Tapi manfaatnya bisa menyelamatkan ekonomi keluarga.”.

Temuan ini sejalan dengan Gustika et al., (2023) yang menegaskan bahwa nelayan termasuk kelompok dengan tingkat kerentanan pekerjaan yang tinggi.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya keterlibatan**

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya keterlibatan nelayan dalam program jaminan sosial di Desa Karangsong antara lain:

#### ***Kurangnya Pengetahuan dan Sosialisasi***

Banyak nelayan yang belum pernah menerima penjelasan langsung mengenai manfaat dan prosedur program jaminan sosial. Sosialisasi dari lembaga terkait masih jarang dilakukan di wilayah pesisir.

#### ***Pendapatan yang Tidak Stabil***

Penghasilan nelayan sangat bergantung pada kondisi laut dan cuaca. Saat hasil tangkapan berkurang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyisihkan uang guna membayar iuran secara rutin.

### ***Rendahnya Tingkat Pendidikan***

Sebagian besar nelayan hanya menempuh pendidikan dasar, sehingga sulit memahami sistem administrasi dan prosedur pendaftaran program jaminan sosial.

### ***Tidak Ada Dukungan dari Kelompok Nelayan***

Kelompok nelayan di Desa Karangsong belum berperan aktif dalam mengajak anggotanya untuk mengikuti program jaminan sosial. Belum ada sistem pembayaran kolektif yang memudahkan mereka dalam membayar iuran secara bersama.

### ***Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah***

Pemerintah daerah belum sepenuhnya fokus memberikan edukasi dan bantuan kepada nelayan agar mereka dapat mengikuti program jaminan sosial.

Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi sosial yang menyatakan bahwa literasi dan persepsi risiko memengaruhi keputusan bergabung dalam program sosial. Hal ini diperkuat oleh temuan (Siami, 2022) yang menyatakan bahwa nelayan sering memaklumi risiko kerja sehingga tidak memprioritaskan perlindungan sosial. Selain itu, implementasi program belum optimal karena keterbatasan peran aparat desa dan kurangnya frekuensi sosialisasi oleh BPJS maupun agen PERISAI.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karangsong, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran nelayan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, pendapatan yang tidak stabil, serta belum adanya dukungan kuat dari lembaga pemerintah maupun kelompok nelayan.

Sebagian besar nelayan masih berfokus pada kegiatan melaut tanpa memperhatikan risiko kerja yang mereka hadapi. Banyak dari mereka belum memahami bahwa jaminan sosial bukan sekadar kewajiban, melainkan perlindungan bagi diri dan keluarganya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Agar kesadaran nelayan meningkat, perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan mudah dipahami. Pendekatan secara personal melalui tokoh masyarakat atau pengurus kelompok nelayan juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan sosial.

Selain itu, sistem pembayaran yang fleksibel dan kemudahan administrasi akan membuat nelayan lebih mudah untuk bergabung. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi, diharapkan seluruh nelayan di Desa Karangsong dapat terlindungi dan merasa aman dalam bekerja, sehingga kesejahteraan mereka dan keluarganya dapat meningkat di masa depan.

## **Upaya Meningkatkan Kesadaran dan Kepesertaan**

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran nelayan terhadap jaminan sosial, beberapa langkah dapat dilakukan, antara lain:

### ***Sosialisasi Langsung kepada Nelayan***

Pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi langsung di tempat aktivitas nelayan, seperti di dermaga atau tempat pelelangan ikan.

### ***Kerja Sama dengan Kelompok Nelayan***

Melibatkan kelompok nelayan dalam kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran dapat memudahkan proses administrasi dan meningkatkan partisipasi.

### ***Kemudahan dalam Pembayaran Iuran***

Sistem pembayaran dapat disesuaikan dengan pola penghasilan nelayan. Misalnya, nelayan dapat membayar iuran pada saat musim tangkapan melimpah.

### ***Pemberian Subsidi Awal***

Pemerintah daerah dapat membantu dengan memberikan subsidi iuran bagi nelayan berpenghasilan rendah agar mereka tertarik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

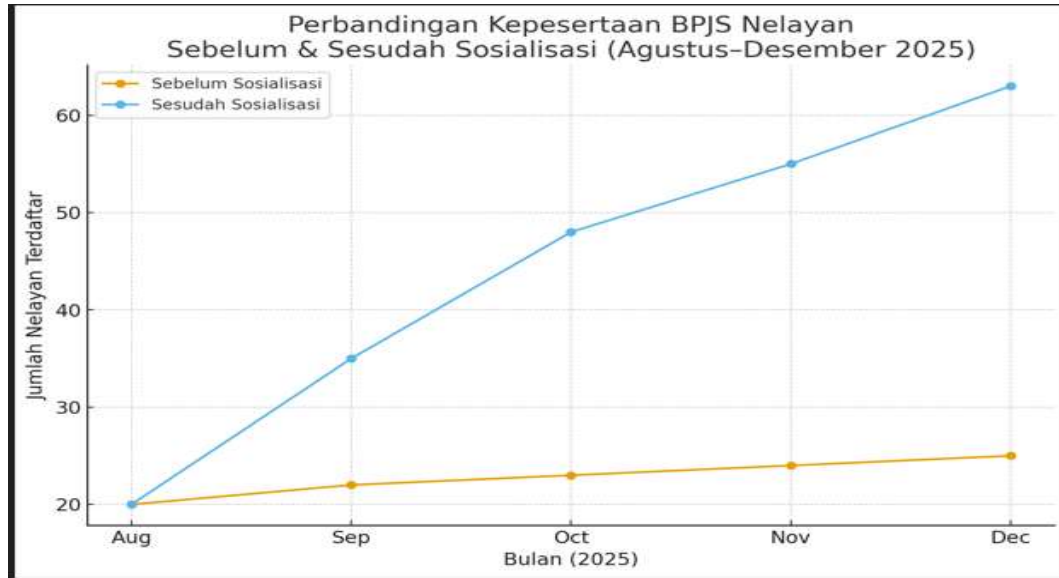
### ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***

Sosialisasi melalui media sosial dan aplikasi digital dapat membantu menyebarkan informasi kepada nelayan, khususnya kalangan muda yang sudah terbiasa menggunakan teknologi.

Setelah dilakukan sosialisasi secara intensif oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama agen PERISAI serta pendekatan langsung yang melibatkan pemerintah desa, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kesadaran nelayan mengenai risiko kerja dan pentingnya jaminan sosial. Menurut (Kuncoro & Wulansari, 2025), peningkatan kepesertaan BPJS sangat bergantung pada seberapa sering sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Sebelum adanya sosialisasi, sebagian besar nelayan menganggap risiko melaut sebagai hal yang wajar dan tidak terlalu membutuhkan perlindungan formal. Penelitian Fadhil et al., (2025) menambahkan bahwa rendahnya literasi keuangan membuat iuran BPJS dipersepsikan sebagai beban, bukan bentuk investasi jangka panjang. Namun, setelah rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan sejak Agustus hingga Desember 2025, nelayan mulai memahami bahwa perlindungan sosial merupakan hak sekaligus kebutuhan untuk menjamin keselamatan ekonomi keluarga.

Menurut (Rajagukguk, 2025), edukasi melalui tokoh masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pekerja informal terhadap program jaminan sosial. Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kepercayaan nelayan. Aparat desa berperan sebagai fasilitator yang membantu menjelaskan manfaat

program BPJS menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan sesuai konteks budaya masyarakat pesisir. Selain itu, agen PERISAI melakukan pendekatan personal melalui kunjungan ke pangkalan nelayan, memberikan contoh kasus nyata, serta mendampingi proses pendaftaran.



**Gambar 1.** Grafik menunjukkan perkembangan jumlah nelayan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Data hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta BPJS yang signifikan setelah sosialisasi. Jika sebelum kegiatan sosialisasi jumlah nelayan yang terdaftar hanya sekitar 20–25 orang, maka pada akhir Desember 2025 terjadi peningkatan hingga lebih dari 60 peserta. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemahaman nelayan mengenai risiko kerja, manfaat perlindungan sosial, dan kemudahan proses pendaftaran mengalami perkembangan yang sangat positif.

Perubahan kesadaran ini juga terlihat dari pernyataan nelayan yang sebelumnya merasa tidak membutuhkan jaminan sosial, kini mulai menyatakan bahwa perlindungan BPJS dapat membantu keluarga mereka jika terjadi kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau kondisi darurat lainnya. Kesadaran ini juga didukung semakin kuatnya pemahaman bahwa pendapatan yang tidak stabil membuat mereka rentan secara ekonomi, sehingga BPJS dianggap sebagai antisipasi jangka panjang.

Serta peningkatan kepesertaan ini secara langsung meningkatkan total iuran yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan.

**Perhitungan Dampak Peningkatan Iuran:**

Besaran iuran = **Rp 16.800 / bulan**

Jumlah peserta awal = **25 orang**

Jumlah peserta akhir = **60 orang**

**Sebelum sosialisasi**

Total iuran = 25 peserta × 16.800 = Rp 420.000 / bulan

**Setelah sosialisasi**

Total iuran = 60 peserta × 16.800 = Rp 1.008.000 / bulan

**Terjadi peningkatan iuran sebesar Rp 588.000 per bulan, atau naik 140%.**

Kenaikan ini menunjukkan bahwa edukasi, pendampingan pendaftaran, dan pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam: Meningkatkan kesadaran nelayan, memperkuat WTP (Willingness to Pay), serta memperluas basis pendapatan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan pendekatan pemerintah desa berpengaruh nyata dalam meningkatkan literasi sosial serta motivasi nelayan untuk berpartisipasi dalam program jaminan sosial. Temuan ini konsisten dengan teori partisipasi sosial yang menyatakan bahwa edukasi, persepsi risiko, dan dukungan institusi memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi pekerja informal terhadap program perlindungan sosial.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian mengenai perlindungan jaminan sosial bagi nelayan di Desa Karangsong menunjukkan bahwa tingkat partisipasi nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah sebelum adanya intervensi sosialisasi. Rendahnya kepesertaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya literasi sosial dan finansial, pendapatan yang tidak stabil, kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS maupun pemerintah desa, serta persepsi nelayan bahwa risiko kerja merupakan hal biasa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tidak melihat urgensi perlindungan sosial, meskipun setiap tahun banyak terjadi kecelakaan kerja dan kematian di wilayah pesisir.

Data kecelakaan pada Januari–Juli 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 75% nelayan yang mengalami kecelakaan maupun kematian belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga keluarga mereka tidak memperoleh santunan ataupun perlindungan finansial. Temuan ini diperkuat dengan hasil analisis Cost–Benefit Analysis (CBA) yang menunjukkan bahwa iuran BPJS yang relatif rendah (Rp 16.800–36.800 per bulan) memberikan manfaat yang jauh

lebih besar, termasuk santunan kematian hingga puluhan juta rupiah dan perlindungan biaya pengobatan tanpa batas. Artinya, secara ekonomi, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang sangat layak (*worth it*) bagi nelayan.

Analisis Ability to Pay (ATP) memperlihatkan bahwa nelayan secara finansial mampu membayar iuran tersebut, karena nominal iuran masih berada dalam batas kemampuan mereka meskipun pendapatan tidak stabil. Namun, analisis Willingness to Pay (WTP) menunjukkan bahwa kesediaan nelayan untuk membayar iuran jauh lebih rendah dibanding kemampuan finansial mereka. Rendahnya WTP ini terutama disebabkan kurangnya pemahaman terhadap manfaat BPJS dan minimnya informasi yang diterima nelayan sebelum dilakukan sosialisasi.

Setelah dilakukan sosialisasi intensif oleh BPJS Ketenagakerjaan, agen PERISAI, dan pemerintah desa sejak Agustus hingga Desember 2025, terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran dan kepesertaan nelayan. Edukasi mengenai manfaat BPJS, pendampingan administratif, serta pendekatan personal melalui perangkat desa terbukti mampu meningkatkan WTP dan mendorong lebih banyak nelayan untuk mendaftar sebagai peserta. Jumlah peserta meningkat dari sekitar 20–25 orang menjadi lebih dari 60 orang di akhir periode sosialisasi. Peningkatan jumlah peserta ini juga berdampak langsung terhadap meningkatnya total iuran yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan rerata iuran Rp 16.800 per bulan, peningkatan kepesertaan menghasilkan kenaikan iuran sekitar 140%.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Perlindungan jaminan sosial bagi nelayan sangat dibutuhkan karena tingginya risiko kerja dan ketidakstabilan pendapatan, 2) Tingkat kepesertaan yang rendah lebih disebabkan oleh rendahnya literasi dan sosialisasi (WTP rendah), bukan ketidakmampuan ekonomi (ATP cukup), 3) Program BPJS Ketenagakerjaan layak secara ekonomi, dibuktikan melalui analisis CBA yang menunjukkan manfaat jauh lebih besar dibanding biaya iuran, 4) Sosialisasi dan pendampingan terbukti meningkatkan kesadaran dan partisipasi nelayan, sehingga menjadi strategi efektif yang perlu dilanjutkan, 5) Pemerintah desa dan agen PERISAI memiliki peran kunci dalam meningkatkan literasi, memperkuat persepsi risiko, dan mendorong keikutsertaan nelayan dalam program perlindungan sosial.

Dengan peningkatan WTP melalui edukasi berkelanjutan, diharapkan seluruh nelayan di Desa Karangsong dapat memperoleh perlindungan sosial yang memadai, sehingga keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan dapat terjaga dan risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. N., Suradi, S., & Kuswanda, D. (2024). *MINAT PEKERJA SEKTOR INFORMAL DALAM KEIKUTSERTAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN MANDIRI DI DESA NGUNUT KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG* (p. 2).
- Anggraini, R., & Fadillah, R. (2024). *Edukasi Dan Pendampingan Pekerja Informal Dalam Optimalisasi Kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. Sevaka: Hasil Kegiatan Layanan Masyarakat. 2.*
- Ezah, W. (2019). *Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).*
- Fadhil, M., Herlinda, H., & Albahi, M. (2025). *PENGARUH LITERASI ASURANSI, RELIGIUSITAS DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP MINAT PEKERJA SEKTOR INFORMAL MENGGUNAKAN ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH KOTA PEKANBARU. XIII(1).*
- Fadilah, A., Keperdataan, B. H., Area, U. M., Hukum, F., & Area, U. M. (2022). *MENGALAMI KECELAKAAN KERJA ( STUDI PADA PT ASURANSI RAMAYANA MEDAN ) UNIVERSITAS MEDAN AREA ( STUDI PADA PT ASURANSI RAMAYANA )* Diajukan sebagai salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana ( Strata-1 ) Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Gustika, W., Dharmawan, A. H., & Abdulkadir-sunito, M. (2023). *Kerentan Nafkah Rumahtangga Nelayan dalam Tekanan Variabilitas Iklim : Studi Kasus Desa Dendun , Kabupaten Bintan , Kepulauan Riau. 21(1), 43–56.* <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.43-56>
- Kuncoro, H. P., & Wulansari, C. (2025). *Optimalisasi Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Pekerja BPU di Surabaya. 2(1), 38–43.*
- Nugraha, Y. S., Rusdijjati, R., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Wicaksono, M. P., & Praditama, D. A. (2023). *Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. 12, 334–353.*
- Pangestu, P. F., Studi, P., Ekonomi, H., Syariah, F., & Negeri, U. I. (2022). *JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN CILACAP PERSPEKTIF MASLAH { AH { MURSALAH { ( Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap ).*
- Prasetya, B. P. (2024). *Peran Literasi Keuangan Nelayan Dan Perilaku Rumah Tangga Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga ( Studi Pada Keluarga Nelayan Di Pelabuhan Sadeng , Gunungkidul , Secara geografis Indonesia berada di diperoleh secara turun-temurun dari nen. 30(1), 126–145.*
- Putri, M. G., Rosyadi, M. A., & Rahmawati, R. (2022). *Strategi Adaptasi Nelayan Menghadapi Perubahan Iklim Masa Pandemi (Studi Kasus Nelayan Desa Tanjung, Lombok Utara). In Prosiding Seminar Nasional Sosiologi. 3, 60–78.*
- Rajagukguk, S. N. (2025). *Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal di Padang Bulan Kota Medan. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11), 88–91.*
- Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2021). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi*

*Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia.* 263–280.

- Siami, D. T. (2022). *ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGANJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (NELAYAN) DI KABUPATEN DEMAK (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).*
- Wahidhani, E. H., & Solihin, L. (2024). *KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL PANTAI UTARA JAWA BARAT DAN DAERAH KHUSUS JAKARTA. Prospek.*, 5(2), 96–102.
- Wahyuni, E. T., Rubiyanto, A., & Widodo, B. L. H. (2024). *ANALISIS PERAWATAN DAN KESELAMATAN KAPAL TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 25(September), 72–83. <https://doi.org/10.33556/jstm>
- Wati, M. L. (2023). *Analisis Strategi Adaptasi Nelayan dalam Menghadapi Dinamika Faktor Eksternal dan Dampak pada Sosial Ekonomi (Studi Kasus: Nelayan di Desa Tegalkamulyan Kabupaten Cilacap). Bachelor Thesis. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, Purwokerto.*
- Bangun, P. R., Syahputri, A. R., Mulkhan, B. I., Yanti, I. N., Prislina, L. C., Maisyarah Maisyarah, & Athar, G. A. (2025). *Pengaruh Tingkat Literasi Finansial dan Persepsi Risiko terhadap Perilaku Konsumtif Impulsif pada Mahasiswa Ekonomi Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2(1), 01–13. <https://doi.org/10.61132/keat.v2i1.815>